

Penandatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) oleh Iran Tahun 2015

Ismi Karima

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Email : ismi.karima-2014@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK: Kesepakatan JCPOA merupakan perjanjian nuklir antara Iran dengan negara-negara P5+1. Kesepakatan JCPOA menjadi hal yang penting bagi politik Iran karena dengan ditandatanganinya JCPOA ini Iran dapat kembali bergabung dalam kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan Iran dalam menyepakati kesepakatan ini memiliki proses yang panjang karena pasalnya proposal kesepakatan telah diajukan sejak tahun 2005, namun Iran baru menyetujuinya pada tahun 2015. Penelitian ini berisi tentang analisis perubahan kebijakan Iran terkait dengan JCPOA. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perubahan kebijakan luar negeri dimana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, yakni faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel. Dari analisis data-data tersebut didapat bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mendasari perubahan kebijakan Iran terkait JCPOA. Faktor internal yakni adanya perubahan rezim dalam politik domestik dan faktor eksternal berasal dari tekanan-tekanan negara Barat, terutama P5+1 melalui pemberian sanksi ekonomi. Selain itu, Iran pada akhirnya menyetujui JCPOA karena adanya keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Iran apabila menyetujui kesepakatan tersebut.

Kata kunci : JCPOA, nuklir Iran, perubahan kebijakan luar negeri, dilema keamanan, insentif, Timur Tengah, normalisasi hubungan

ABSTRACT: The JCPOA agreement is a nuclear agreement between Iran and the P5 + 1 countries. The JCPOA Agreement is important for Iranian politics because with the signing of this JCPOA Iran can re-join international trade activities. Iran's policy in agreeing on the deal has a lengthy process because the proposed deal has been filed since 2005, but Iran just approved it by 2015. This study contains an analysis of Iranian policy changes related to JCPOA. In this research, researcher use approach of foreign policy change where there are factors influencing foreign policy of a country, that is internal and external factor. This research is qualitative by using secondary data, such as books, journals, and articles. From the analysis of the data, it is found that there are internal and external factors that underlie the change of Iran policy related to JCPOA. The internal factors of regime change in domestic politics and external factors stem from Western pressures, especially P5 + 1 through economic sanctions. In addition, Iran finally approved the JCPOA because of Iran's benefits when it agreed to the deal.

Keywords : JCPOA, Iranian nuclear, foreign policy changes, security dilemma, incentives, Middle East, relationships normalization

Pendahuluan

Pasca Perang Dunia II, teknologi nuklir menjadi salah satu teknologi yang semakin gencar dikembangkan. Hal ini dikarenakan pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menggunakan teknologi nuklir sebagai senjata untuk menyerang Jepang dan kemudian membawa kemenangan bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Semakin banyaknya negara yang mengembangkan teknologi nuklir membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu badan khusus yang memiliki fungsi untuk mengawasi penggunaan energi nuklir, yakni International Atomic Energy Agency (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional. Selain mengawasi penggunaan energi nuklir, badan ini juga dibentuk untuk mendukung dan membantu penelitian, pengembangan, dan aplikasi praktik energi atom demi meningkatkan perdamaian di dunia. IAEA juga berfungsi untuk menyusun dan mengatur usaha perlindungan untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi bukanlah untuk tujuan militer (Nuclear Threat Initiative, 2016). IAEA juga berfungsi untuk melakukan pengawasan dan inspeksi, baik kepada negara anggota maupun negara bukan anggota dengan izin dari negara yang bersangkutan (Jones et al, 1998: 15).

Dalam menjalankan fungsinya, IAEA memiliki suatu program yang disebut dengan Nuclear non-Proliferation Treaty (NPT). NPT merupakan sebuah perjanjian kepemilikan nuklir. Didalam NPT terdapat pelarangan adanya penciptaan dan pengembangan energi nuklir sebagai senjata bagi negara-negara non-nuklir dan perizinan untuk mengembangkan energi nuklir sebagai teknologi atas dasar perdamaian dunia bagi negara yang memiliki nuklir. Selain itu, didalam NPT juga terdapat perjanjian diantara negara pemilik senjata nuklir untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir (Jones, et al, 1998: 15). Penggunaan energi nuklir ini perlu diawasi oleh lembaga tertentu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan energi nuklir yang dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Adanya kemungkinan penyalahgunaan energi nuklir tersebut kemudian membuat energi nuklir ini menjadi sesuatu yang kontroversial di dunia internasional. Di satu sisi, energi nuklir merupakan sumber daya listrik yang memiliki kapasitas yang besar dan dapat dijadikan sebagai energi alternatif, namun di sisi lain energi nuklir juga dapat menjadi sesuatu yang berbahaya dan mematikan.

Salah satu negara yang mengembangkan teknologi nuklir pasca Perang Dunia II yaitu Iran. Seperti halnya negara lain, Iran memiliki hak untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Berdasarkan Artikel IV NPT (Non-Proliferation Treaty), Iran juga dapat melakukan kerja sama internasional dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan keuntungan dari energi nuklir. Tujuan utama Iran dalam melakukan pengembangan teknologi nuklir yaitu Iran mengatakan bahwa populasi individu di negara tersebut akan mengalami peningkatan dua kali lipat dalam dua puluh tahun mendatang. Bertambahnya populasi individu tersebut akan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah kebutuhan energi. Iran telah mengimpor gas dan listrik serta melakukan pembakaran bahan bakar fosil untuk mendapatkan energi. Namun hal ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan Iran di masa depan. Persediaan minyak Iran juga telah mengalami penurunan dan hanya dapat bertahan hingga 75-90 tahun ke depan. Oleh karenanya, Iran ingin melakukan diversifikasi sumber energi, salah satunya dengan menggunakan energi nuklir sehingga memutuskan untuk bergabung dengan NPT (Non-Proliferation Treaty) (El Kasm, 2008: 9).

Program pengembangan teknologi Iran dimulai pada tahun 1950 di bawah pemerintahan Mohammed Reza Shah, seorang Shah Iran dengan bekerja sama dan mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Pengembangan teknologi nuklir tersebut merupakan salah satu bagian dari

program *Atoms for Peace* yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower. Program *Atoms for Peace* tersebut ditujukan untuk memanfaatkan energi atom untuk mendukung terciptanya perdamaian dunia. Tidak hanya dengan Iran, dalam program ini Amerika Serikat juga bekerja sama dengan negara berkembang lainnya untuk mengembangkan energi atom (Institute for Science and International Security, t.t. : 1). Karena Iran telah memiliki program pengembangan teknologi nuklir, pada tahun 1968, Iran pun bergabung dengan perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty) yang dibentuk oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) (El Kasm, 2008: 6). Kemudian, setelah terjadinya Revolusi Iran tahun 1979, program nuklir dihentikan karena dianggap tidak Islami. Namun lima tahun kemudian, pada tahun 1984, pemimpin Iran memerintahkan untuk membuka kembali program nuklir hingga Iran berhasil memiliki sumber uranium yang melimpah dan dapat menghasilkan senjata nuklir (Institute for Science and International Security, t.t.).

Aksi pengembangan energi nuklir Iran yang terus-menerus tersebut dinilai melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam NPT. Pelanggaran terkait pengembangan energi nuklir Iran tersebut menimbulkan reaksi dari negara-negara lain, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Negara-negara tersebut menuduh Iran telah mengembangkan senjata nuklir yang untuk kepentingan militer. Namun, Iran menolak tuduhan tersebut. Iran menyatakan bahwa program pengembangan nuklir tersebut murni dilakukan untuk tujuan damai, bukan untuk kepentingan militer seperti yang dituduhkan oleh negara-negara tersebut. Tuduhan tersebut lantas membawa Iran kepada dialog bersama trio EU, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Dalam dialog tersebut ditandatangani protokol yang dikenal sebagai Protokol Tambahan yang didalamnya dijelaskan bahwa IAEA dapat melakukan inspeksi mendadak terkait program nuklir Iran. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Iran tidak melakukan pengembangan nuklir untuk senjata militer dan mencegah Iran menyembunyikan aktivitas pengembangan nuklirnya. Setelah dialog tersebut, Iran pada akhirnya menghentikan program pengayaan uraniumnya (*uranium enrichment*). Meski telah menghentikan program pengayaan uraniumnya, desakan internasional terhadap Iran untuk menghentikan seluruh program nuklirnya justru semakin besar dan aturan-aturan mengenai nuklir Iran semakin diperketat. Merespon hal tersebut, Iran justru kembali mengadakan program pengayaan uranium dan semakin mengembangkan teknologi nuklirnya (Kurniawan, t.t.).

Pemerintah Iran yang terus menolak untuk menghentikan seluruh program nuklirnya membuat Dewan Keamanan PBB atau negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Russia, dan Tiongkok) memberikan sanksi kepada negara tersebut sebagai akibat telah melanggar perjanjian NPT. Sanksi terhadap Iran tersebut berupa sanksi ekonomi, seperti pelarangan impor dan ekspor, pembekuan aset, dan lain sebagainya. Sanksi terhadap Iran ini pun pertama kali diberikan pada tahun 1979. Kemudian, sanksi tersebut semakin diperketat pada tahun 1995 karena Iran tetap bersikokoh untuk tidak menghentikan program nuklirnya dan tetap melakukan pengembangan teknologi nuklir. Tidak hanya sampai disitu, pada tahun 2006 dan 2010 sanksi pun terus diperketat supaya Iran mau menghentikan program nuklirnya. Akan tetapi, upaya pemberian sanksi tersebut tetap tidak membuat Iran goyah dalam mengembangkan teknologi nuklirnya (Al Jazeera, 2012).

Selain melalui sanksi-sanksi ekonomi, negara-negara P5+1 juga melakukan upaya melalui jalur diplomasi dan negosiasi berupa pengajuan kesepakatan penghentian nuklir kepada Iran. Upaya melalui diplomasi dan negosiasi tersebut dimulai pada tahun 2005 dan pada saat itu Iran menolak untuk menandatangani kesepakatan yang diajukan. Pada tahun 2006, negara-negara P5+1 kembali mengajukan proposal kesepakatan kepada Iran yang menawarkan insentif-insentif yang akan didapat oleh Iran apabila negara tersebut sepakat untuk menghentikan program pengembangan teknologi nuklirnya. Akan tetapi, lagi-lagi Iran menolak kesepakatan

tersebut dan tetap melanjutkan program pengembangan nuklirnya. Begitu pun pada tahun 2008, Iran masih tidak menanggapi proposal kesepakatan tersebut dan memilih untuk tetap mengembangkan teknologi nuklirnya (Davenport, 2018). Seiring dengan penolakan Iran terhadap kesepakatan terkait penghentian program nuklir, Dewan Keamanan terus memberikan dan memperketat sanksi bagi Iran.

Upaya negosiasi terkait program pengembangan teknologi nuklir Iran oleh negara-negara P5+1 pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, Iran bertemu dengan negara-negara P5+1 di Istanbul, Turki untuk melakukan dialog terkait dengan program nuklir Iran. Dalam dialog tersebut, pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi secara selangkah demi selangkah (*step-by-step*) dan dengan aksi timbal balik (*reciprocal actions*). Pada bulan Februari tahun 2013, pertemuan kembali diadakan di Almaty, Kazakhstan. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara P5+1 menawarkan proposal yang telah diperbarui dari proposal sebelumnya, tetapi Iran masih belum memperlihatkan itikad untuk menerimanya. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan bernegosiasi, pada tahun 2015 Iran dan negara-negara P5+1 pun secara resmi menyepakati kesepakatan komprehensif (*comprehensive deal*) terkait program pengembangan teknologi nuklir Iran. Dengan disepakatinya kesepakatan tersebut, Iran pun mulai mengambil langkah-langkah untuk membatasi program nuklirnya. Sebagai gantinya, Amerika Serikat dan Uni Eropa akan mencabut sanksi-sanksi yang selama ini telah diberikan kepada Iran (Davenport, 2018).

Kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara P5+1 tersebut kemudian dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Pada dasarnya, kesepakatan JCPOA yang disepakati oleh Iran dan P5+1 tersebut merupakan suatu kesepakatan timbal balik. Iran menyepakati JCPOA supaya P5+1 mencabut sanksi-sanksi yang diberikan kepada Iran dengan imbalan pembatasan terhadap ruang lingkup dan tingkat kegiatan pengayaan nuklir (*nuclear enrichment*) Iran serta kapasitas dan lokasi fasilitas pengayaannya. Dalam kesepakatan tersebut juga disepakati bahwa Iran harus menghentikan pembangunan reaktor di Arak dan tidak melakukan pemrosesan bahan bakar nuklir bekas dan membangun fasilitas baru. Selain itu, Iran juga dituntut supaya lebih transparan dan meratifikasi serta menerapkan Protokol Tambahan. Seperti yang disebutkan dalam JCPOA, apabila Iran telah berhasil melaksanakan hal-hal tersebut, maka program nuklir Iran akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti negara anggota lainnya dalam NPT. Secara garis besar, JCPOA menempatkan batasan pada program nuklir Iran dan juga mencakup ketentuan pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi usaha Iran untuk memproduksi senjata nuklir menggunakan fasilitas, baik yang terdaftar maupun yang tidak (Katzman dan Kerr, 2016 : 7-9). JCPOA membentuk Komisi Bersama (*Joint Commission*) yang beranggotakan perwakilan dari semua pihak perundingan. Tujuan dibentuknya *Joint Commission* ini yaitu untuk memantau pelaksanaan dari JCPOA. Komisi tersebut diketuai oleh Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (Laub, 2017).

Terdapat perubahan kebijakan luar negeri Iran terkait dengan permasalahan pengembangan program teknologi nuklir. Perubahan tersebut berupa Iran yang pada awalnya menolak untuk menghentikan program nuklirnya karena adanya tuduhan dari negara-negara lain dan komunitas internasional, pada akhirnya menyetujui proposal kesepakatan nuklir yang diajukan selama bertahun-tahun tersebut. Untuk menganalisis perubahan kebijakan Iran dalam kesepakatan nuklir dengan negara P5+1, peneliti menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Jacob Gustavsson (1999) yang mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mendasari adanya perubahan kebijakan luar negeri, yaitu faktor domestik dan internasional (Gustavsson, 1999: 83). Untuk lebih menjelaskan mengenai perubahan kebijakan politik dari sisi domestik, peneliti juga menggunakan perspektif sistem politik domestik. Inti

dari perspektif sistem politik domestik dalam perubahan kebijakan politik adalah adanya asumsi bahwa penguasa atau rezim, yaitu pihak-pihak yang menciptakan kebijakan luar negeri suatu negara melakukan perubahan kebijakan untuk mendapatkan legitimasi dan mempertahankan rezim tersebut (Hermann, 1990: 6). Sedangkan untuk faktor internasional, peneliti mengacu pada kondisi atau situasi dilema keamanan yang dialami oleh Iran sebagai faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan. Selain itu, faktor internasional juga berasal dari tekanan-tekanan dari negara lain, terutama negara P5+1 melalui sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran sebagai penyebab adanya perubahan kebijakan luar negeri.

Pembahasan

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat konflik yang tinggi. Kawasan tersebut memiliki berbagai macam konflik, mulai dari konflik bangsa, negara, hingga konflik sumber daya alam. Banyaknya konflik yang ada membuat kawasan Timur Tengah mengalami instabilitas. Instabilitas ini kemudian dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara di Timur Tengah. Salah satu negara yang terancam dengan instabilitas yang terjadi di kawasan yaitu Iran. Iran merupakan salah satu negara kuat di Timur Tengah. Hal ini ditandai dengan kapabilitas negara tersebut dalam mengembangkan teknologi nuklir. Iran juga menjadi aktor dalam konflik kelompok utama di Timur Tengah, yakni konflik kelompok Syiah dan Sunni bersama dengan negara Arab Saudi (Pagi, 2016). Konflik kelompok tersebut telah berlangsung sejak lama dan terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut menyebabkan Iran memiliki hubungan yang tidak baik dengan Arab Saudi dan menjadikannya sebagai musuh utama dalam kawasan. Tidak hanya dengan Arab Saudi, Iran pun juga bertentangan dengan negara-negara dengan kelompok Sunni lainnya. Konflik kelompok tersebut kemudian menjadi semakin rumit ketika dibarengi dengan kepentingan politik yang dimiliki oleh masing-masing negara di kawasan tersebut (Hartert-Mojdehi dan Linardy, 2012).

Tidak hanya menimbulkan instabilitas, konflik Iran dan Arab Saudi juga menimbulkan kondisi dilema keamanan bagi Iran. Dilema keamanan merupakan suatu situasi dimana negara merasa terancam dengan bertambahnya kekuatan dari negara lain (Snyder, 1984: 461). Dilema keamanan Iran muncul karena adanya peningkatan kekuatan militer dan sikap agresifitas musuh utamanya dalam kawasan, yakni Arab Saudi. Dalam hal pertahanan dan militer, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki anggaran militer cukup besar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir anggaran militer Arab Saudi terus mengalami peningkatan. Kenaikan anggaran militer yang terus-menerus selama beberapa tahun tersebut menyebabkan Arab Saudi termasuk dalam 15 besar negara dengan pengeluaran militer terbesar. Arab Saudi berada pada peringkat keempat setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Russia (McCarthy, 2017). Selain dengan meningkatkan anggaran militer, Arab Saudi juga menjalin kerjasama militer untuk menguatkan kekuatannya. Kerjasama tersebut dijalin baik dengan negara-negara di kawasan, maupun dengan negara-negara di luar Timur Tengah (Levallois, 2016: 7).

Sedangkan sikap agresifitas Arab Saudi terlihat dari adanya intervensi atau campur tangan Arab Saudi beberapa konflik di Timur Tengah, seperti konflik di Yaman, Suriah, dan Bahrain. Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada tahun 2015. Pada tahun 2011 Yaman dilanda inflasi dan cadangan pendapatan negara tersebut telah habis karena adanya praktik korupsi, pemerasan, dan penggelapan yang dilakukan oleh pemimpin negara tersebut, Presiden Ali Abdullah Saleh. Krisis tersebut berujung pada digulingkannya Saleh dari jabatannya. Penggulingan presiden tersebut kemudian diikuti dengan adanya perang sipil antara kelompok pemberontak Houthi dan kelompok pendukung pemerintah (Najjar dan Al-Karimi, 2017). Melihat adanya gejolak tersebut, Arab Saudi pun melakukan intervensi untuk membantu Yaman

dari serangan kelompok Houthi melakukan pemberontakan setelah Houthi berhasil mengambil alih kendali ibukota Yaman, Sanaa dan sebagian besar wilayah Yaman (Saraswati, 2017).

Intervensi ke Yaman yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut tidak hanya bertujuan untuk membantu Yaman mempertahankan kedaulatannya. Terdapat tiga kepentingan nasional Arab Saudi dalam melakukan intervensi ke Yaman, yakni kepentingan politik minyak, politik perbatasan, dan politik ideologi (Saraswati, 2017). Dalam politik minyak, Yaman merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Laut Merah yang dinilai memiliki sumber daya minyak. Dengan menguasai Yaman, maka Arab Saudi dapat mengamankan sumber minyak tersebut. Dalam politik perbatasan, Arab Saudi dan Yaman telah terlibat konflik masalah perbatasan. Intervensi Arab Saudi di Yaman kemudian dianggap sebagai upaya Arab Saudi supaya dapat menguasai Yaman secara *de jure* sehingga Arab Saudi bisa melakukan lobi-lobi perbatasan yang menguntungkan bagi Arab Saudi. Sementara dalam politik ideologi, kelompok pemberontak Houthi di Yaman merupakan kelompok yang memiliki kedekatan ideologi dengan Iran. Hal ini membuat Arab Saudi dalam intervensinya membela pemerintah Yaman sehingga dapat meredam kegiatan pemberontakan kelompok Houthi. Di samping itu, Arab Saudi juga khawatir Yaman akan menjadi negara demokratis yang menyebabkan kelompok Houthi tersebut dapat berpartisipasi dalam pemerintahan (Saraswati, 2017). Adanya kepentingan-kepentingan Arab Saudi dalam melakukan intervensi di Yaman tersebut kemudian dipandang Iran sebagai ancaman yang mengancam kekuatan Iran di kawasan, terlebih adanya kepentingan ideologi dimana Arab Saudi menginginkan Yaman memiliki ideologi, yakni Sunni yang berbeda dengan Iran.

Tidak hanya di Yaman, Arab Saudi juga melakukan intervensi dalam konflik di Suriah. Konflik di Suriah sendiri diawali dengan adanya protes dari penduduk Suriah karena tingginya angka pengangguran, korupsi, dan tidak adanya kebebasan politik di bawah pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Protes tersebut berujung pada munculnya kelompok pro demokrasi di wilayah selatan Suriah, Deraa. Kelompok pro demokrasi pun melakukan demonstrasi-demonstrasi supaya demokrasi diterapkan di negara tersebut. Dalam merespon aksi-aksi demonstrasi, pemerintah Suriah mengirimkan pasukan untuk menghabisi kelompok pro demokrasi tersebut. Pengiriman pasukan oleh pemerintah Suriah tidak membuat aksi demonstrasi tersebut mereda, namun justru membuat terciptanya perang sipil diantara warga Suriah. Perang sipil yang terjadi tersebut kemudian menjadi semakin parah dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan atau intervensi dari berbagai pihak, baik negara maupun nonnegara. Pemerintah Suriah juga membiarkan kelompok jihad Islamic State (IS) dan Al-Qaeda untuk berkembang di negara tersebut yang membuat situasi menjadi semakin rumit (BBC News, 2018).

Dalam intervensi ke Suriah, Arab Saudi membela kelompok pemberontak anti-Assad atau kelompok pro demokrasi, bersamaan dengan negara-negara dengan mayoritas Sunni lainnya, seperti Turki dan Qatar, serta didukung oleh Amerika Serikat (Al Jazeera, 2018). Meskipun Arab Saudi dan kelompok pro demokrasi memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan Assad, Arab Saudi memiliki agenda atau kepentingan sendiri dalam intervensi ke Suriah tersebut. Intervensi Arab Saudi di Suriah didasarkan pada upaya untuk menghilangkan pengaruh Iran di negara tersebut. Keberpihakan Arab Saudi kepada kelompok pro demokrasi pun juga dilatarbelakangi oleh kepentingan supaya Suriah memiliki pemerintahan yang didominasi kelompok Sunni dimana Bashar Al-Assad tersebut berasal dari kelompok Syiah yang didukung oleh Iran dan Russia. Dengan bergantinya dominasi dalam pemerintahan Suriah tersebut maka akan membuat Arab Saudi menjadi lebih mudah untuk meluaskan kekuasaannya di negara-negara Syiah lainnya dan menjadi pemimpin negara-negara Sunni (Rydell, 2017: 30-1). Motif Arab Saudi untuk menghilangkan pengaruh Iran dan menguasai Suriah itulah yang

menyebabkan kondisi dilema keamanan bagi Iran, terlebih selama ini Suriah selalu mendapat dukungan dari Iran.

Negara lain yang juga menjadi obyek intervensi Arab Saudi yaitu Bahrain. Hampir sama dengan konflik di Yaman dan Suriah, konflik di Bahrain ini juga dipicu oleh adanya kelompok oposisi atau antipemerintah. Aksi protes di Bahrain ini dilakukan oleh kelompok mayoritas Syiah yang merasa terdiskriminasi oleh pemerintah pada masa itu yang berasal dari kelompok Sunni. Aksi protes ini kemudian mendorong terjadinya perang sipil di negara tersebut dan telah menewaskan banyak korban. Arab Saudi melakukan intervensi dalam konflik di Bahrain karena Bahrain memiliki peran strategis yang penting bagi Arab Saudi, terutama dalam alasan ekonomi, sektarian, dan geopolitik. Bahrain sendiri terletak di ujung provinsi bagian timur Arab Saudi, salah satu daerah penghasil minyak terbesar di wilayah Arab Saudi (Bronson, 2011). Bahrain pun telah menjalin hubungan dengan Arab Saudi dan menjadi mitra dagang terbesar bagi negara tersebut. Selain berdagang, Arab Saudi juga menanamkan berbagai investasi di Bahrain, seperti investasi dalam pariwisata, konstruksi, dan lain sebagainya (Nuruzzaman, 2013: 5).

Peningkatan kekuatan negara dan sikap agresif Arab Saudi membuat Iran berada dalam kondisi dilema keamanan. Kondisi dilema keamanan tersebut membuat Iran pun turut melakukan peningkatan kekuatan nasional, salah satunya dengan mengembangkan teknologi nuklir. Selama beberapa dekade Iran terus mengembangkan teknologi nuklir yang memiliki kekuatan yang besar, meskipun aksi pengembangan tersebut telah dikecam oleh beberapa negara. Dalam teori dilema keamanan dikatakan bahwa tidak ada negara yang memiliki keinginan untuk menyerang negara lain dan tidak ada pula yang dapat memastikan bahwa tujuan negara dalam mencari kekuatan adalah untuk tujuan damai. Begitu pula yang terjadi dan dialami oleh Iran. Perilaku-perilaku Arab Saudi dalam upaya meningkatkan kekuatannya tersebut membuat Iran merasa tidak aman (*insecure*) dan menganggap apa yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut sebagai ancaman bagi keamanan Iran, terlebih kedua negara ini telah saling berkompetisi dan berkonflik dalam waktu yang lama. Dengan demikian, perilaku Arab Saudi dalam menghimpun kekuatan tersebut telah membuat Iran berada dalam kondisi dilema keamanan sehingga Iran pun juga berupaya untuk meningkatkan kekuatannya.

Selain dengan mengembangkan teknologi nuklir, upaya peningkatan kekuatan nasional Iran juga dilakukan melalui penyetujuan kesepakatan nuklir, JCPOA. Penandatanganan JCPOA dilakukan oleh Iran sebagai upaya untuk mengurangi situasi dilema keamanan yang dialaminya, terlebih setelah adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat membuat instabilitas dalam politik domestik Iran. Apabila krisis ekonomi terus terjadi dan berlanjut, maka dapat mendatangkan ancaman bagi Iran dari sisi internal negara. Dengan demikian, keputusan Iran menandatangani perjanjian JCPOA dilakukan untuk mengurangi situasi dilema keamanan yang sedang dialaminya. Penandatanganan JCPOA tersebut membuat ketegangan hubungan Iran dengan negara P5+1 menjadi mencair sehingga keberadaan P5+1 bukan lagi menjadi ancaman bagi Iran. Penandatanganan JCPOA tersebut telah mengurangi musuh yang harus dihadapi oleh Iran dalam keadaan dilema keamanan. Selain itu, dengan ditandatanganinya JCPOA, sanksi-sanksi ekonomi yang selama ini diberikan kepada Iran diberhentikan sehingga dapat mengakhiri krisis ekonomi di negara tersebut. Setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut, Iran hanya perlu berfokus untuk mengurangi dilema keamanan yang disebabkan oleh perilaku-perilaku Arab Saudi yang dipandang mengancam keamanan dan pertahanan Iran.

Dicabutnya sanksi-sanksi ekonomi membuat Iran dapat melakukan kembali perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Hal ini kemudian dimanfaatkan Iran untuk menguatkan kekuatan militernya, yakni dengan meningkatkan anggaran pembelanjaan militer.

Dalam pembelanjaan senjata militer, Amerika Serikat menjadi eksportir utama bagi Iran sejak tahun 1979 hingga tahun 1990an. Namun, ketika Amerika Serikat memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, Amerika Serikat tidak lagi menjadi eksportir utama senjata bagi Iran. Hal ini dikarenakan pada masa sanksi tersebut Amerika Serikat mengurangi dan membatasi transaksi internasional dengan Iran. Pada masa tersebut, Iran banyak mendapat pasokan senjata militer dari Russia dan Tiongkok. Selain mendapat pasokan dari dua negara tersebut, Iran mendapatkan senjata dengan membangun industri militer. Industri militer Iran berhasil membuat tank, pesawat tempur, kapal selam, dan peralatan militer lainnya. Iran juga mengekspor hasil industri militernya ke negara-negara lain, seperti Suriah dan Sudan (Kuek Ser, 2016). Meskipun Iran telah mampu memenuhi kebutuhan persenjataan militernya, para ahli militer asing meyakini bahwa Iran tidak memiliki kemampuan industri atau teknis untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengembangkan atau merakit sistem senjata yang telah dirancang oleh negara lain. Hal ini kemudian membuat Iran akan terus memiliki ketergantungan terhadap negara lain dalam proses persenjataan (*armament process*) (GlobalSecurity.org, 2011).

Selain berdampak pada pencabutan sanksi-sanksi ekonomi Iran, penandatanganan JCPOA juga berdampak pada hubungan Iran dengan negara-negara P5+1. Sebelum JCPOA disetujui, Iran dan P5+1 memiliki hubungan bilateral yang kurang harmonis, terutama dengan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Hubungan bilateral antara negara-negara tersebut dipenuhi dengan ketegangan akibat Iran yang tidak mau menghentikan program pengembangan nuklirnya. Akan tetapi, hubungan bilateral Iran dengan negara-negara P5+1 mengalami normalisasi pasca ditandatanganinya kesepakatan nuklir JCPOA, seperti hubungan bilateral Iran dengan Amerika Serikat. Iran dan Amerika Serikat telah menjalin hubungan sejak tahun 1958 ketika Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Iran dalam program pengembangan nuklir yang telah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam masa tersebut, Iran dan Amerika Serikat memiliki hubungan baik. Tidak hanya dengan memberi bantuan untuk program nuklirnya, Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada pemimpin Iran kala itu. Kemudian, hubungan keduanya mengalami ketegangan ketika adanya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Iran yang menuntut adanya revolusi dalam pemerintahan. Demonstrasi tersebut dilakukan karena masyarakat Iran menolak adanya aturan sekularisme. Aksi ini pun berhasil membuat pemimpin Iran turun dari kursi pemerintahan. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Iran 1979 (BBC News, 2014).

Setelah terjadinya revolusi, Iran dan Amerika Serikat tetap menjalin hubungan walaupun hubungan tersebut bersifat tidak resmi. Hal ini dikarenakan hubungan kedua negara pada masa ini bukanlah hubungan yang bersifat diplomatik. Hubungan Iran dan Amerika Serikat tersebut sekadar hubungan perdagangan senjata. Namun, pada tahun 1988 ketegangan hubungan di antara keduanya kembali terjadi. Hal ini dikarenakan kapal perang Amerika Serikat menembak pesawat Iran dan menewaskan 290 orang di daerah Teluk. Dalam aksinya tersebut, Amerika Serikat mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kesalahan karena mengira pesawat tersebut adalah pesawat tempur. Peristiwa tersebut kemudian terus menciptakan ketegangan dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat. Hubungan pun semakin memanas setelah terjadinya peristiwa 9/11 pada tahun 2001 yang membuat Amerika Serikat mengategorikan Iran sebagai poros setan (*axis of evil*) bersama dengan Iraq dan Korea Utara. Ketegangan hubungan Iran dan Amerika Serikat mencapai puncaknya ketika Ahmadinejad terpilih menjadi presiden Iran. Hal ini dikarenakan Ahmadinejad merupakan pemimpin konservatif yang membuat Iran menganut isolasionisme sehingga pada masa pemerintahannya, Iran tidak melakukan interaksi dengan negara lain, terlebih adanya sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran atas aktivitas dan program pengembangan nuklirnya (BBC News, 2014). Namun, hubungan kedua negara ini kembali membaik setelah ditandatanganinya JCPOA pada tahun 2015.

Demikian pula dengan hubungan bilateral Iran dengan Jerman, Inggris, dan Prancis. Dalam hubungan bilateral, Iran dan Jerman memiliki hubungan yang baik sebelum adanya kecurigaan terhadap aktivitas nuklir Iran. Namun, setelah adanya kecurigaan tersebut, hubungan keduanya pun mengalami ketegangan. Hubungan tersebut kemudian semakin buruk ketika Iran menerapkan isolasionisme di masa pemerintahan Presiden Ahmaddinejad (Fathollah-Nejad, 2017: 37-8). Setelah adanya ketegangan hubungan ketika masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad, hubungan Iran dengan Jerman mengalami normalisasi setelah Iran menyepakati kesepakatan JCPOA. Setelah adanya JCPOA, Iran dan Jerman kembali menguatkan hubungan bilateral, salah satunya melalui hubungan ekonomi. Dalam hal ekonomi, pasca disepakatinya JCPOA ekspor Jerman ke Iran mengalami peningkatan, setelah sebelumnya keduanya tidak melakukan transaksi perdagangan. Hal tersebut disebabkan adanya permintaan Iran yang tinggi akan mesin dan peralatan, kendaraan dan bahan kimia, begitu pula dengan obat-obatan dan produk medis (Financial Tribune, 2018).

Hampir sama dengan Jerman, dalam hubungan bilateral, Iran dan Prancis telah menjalin hubungan, baik dalam hubungan diplomatik maupun ekonomi. Hubungan diplomatik Iran dan Prancis telah dibangun sejak sebelum adanya Revolusi Iran tahun 1979. Setelah terjadinya revolusi, ketegangan mulai muncul dalam hubungan kedua negara tersebut, yakni ketika Prancis menolak melakukan kerja sama dengan Iran karena Iran dituduh telah menyerang Prancis dengan melakukan penyanderaan warga Prancis di Lebanon dan aksi pengeboman di Prancis. Penolakan kerja sama tersebut berujung pada berakhirnya hubungan diplomatik antara Iran dengan Prancis. Selang beberapa waktu kemudian, kedua negara tersebut kembali menjalin hubungan diplomatik. Namun, hubungan tersebut kembali menegang ketika Iran melakukan program aktivitas nuklirnya dan ketegangan tersebut mereda kembali setelah ditandatanganinya kesepakatan JCPOA (France 24, 2016). Setelah adanya JCPOA, Iran dan Prancis kembali memperbaiki hubungan. Perbaikan hubungan tersebut dilakukan melalui hubungan ekonomi. Setelah dicabutnya sanksi ekonomi Iran, Prancis kembali melakukan transaksi perdagangan dengan Iran.

Berbeda dengan Jerman dan Prancis, hubungan bilateral Iran dan Inggris telah diwarnai ketegangan sejak masa Perang Dunia II. Ketegangan tersebut disebabkan pada masa Perang Dunia II, Iran menyatakan bahwa ia akan bersikap netral, namun pada kenyataannya Iran justru memperluas dan memperkuat hubungan dagangnya dengan Jerman. Setelah Perang Dunia II berakhir, Iran dan Inggris pun mulai menjalin hubungan diplomatik. Akan tetapi, hubungan diplomatik keduanya masih dipenuhi oleh ketegangan hingga pada akhirnya Inggris memutuskan untuk menutup kedutaannya di Tehran pada tahun 1979 ketika Revolusi Iran terjadi. Sepuluh tahun kemudian, kedutaan Inggris di Tehran kembali dibuka dan hubungan keduanya mengalami peningkatan. Namun tak lama setelah itu, ketegangan kembali terjadi ketika Inggris mengusir seorang diplomat Iran sebagai pembalasan atas pengusiran yang dilakukan Iran kepada diplomat Inggris. Setelah diresmikannya JCPOA pada tahun 2015, Iran juga melakukan normalisasi hubungan bilateralnya dengan Inggris. Iran memustuskan untuk membuka kembali kedutaan Inggris di Tehran. Iran dan Inggris pun juga kembali membangun hubungan ekonomi dan bisnis dalam upaya normalisasi hubungan kedua negara (BBC News, 2015).

Russia dan Tiongkok merupakan dua negara aliansi terbesar Iran pada masa kontemporer ini. Hubungan bilateral antara Iran dengan Russia dan Tiongkok pun menjadi semakin menguat, terlebih setelah adanya kesepakatan nuklir, JCPOA. Berbeda dengan Amerika Serikat dan ketiga negara Uni Eropa sebelumnya, hubungan Iran dengan Tiongkok ini telah terjalin sejak berabad-abad lalu pada saat masa kerajaan Persia dan kekaisaran Tiongkok. Kedua kerajaan ini menjalin

hubungan karena kedua wilayah tersebut terhubung dengan Jalur Sutra dan memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang sangat erat. Dalam sejarah hubungan diplomatik Iran dan Tiongkok, pertukaran budaya, agama, perdagangan, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi ciri khas merupakan karakteristik dari hubungan bilateral Iran dan Tiongkok. Hubungan Iran dan Tiongkok pun terus terjalin hingga pada tahun 1971 keduanya memutuskan untuk membangun hubungan diplomatik dan membuat hubungan mereka semakin erat, terutama dalam bidang ekonomi, energi, keamanan, dan politik (Liu dan Wu, 2010: 41-2).

Sedangkan dalam hubungan bilateral dengan Russia, Iran dan Russia merupakan dua pihak yang telah diselubungi ketegangan sejak berabad-abad lalu ketika masa kekaisaran Persia dan kerajaan Russia. Keduanya adalah musuh dan selalu terlibat konflik, terutama terkait perebutan wilayah. Kerajaan Russia terus memaksa Iran untuk menyerahkan wilayah yang sekarang menjadi negara Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, serta menyerahkan wilayah Kaukasus dan Asia Tengah. Sejak masa itu, Russia terus melakukan pendudukan terhadap Iran, bahkan setelah Perang Dunia II Russia menolak meninggalkan Iran dan menimbulkan gejolak dalam politik internasional. Hubungan Iran dengan Russia mengalami peningkatan sejak Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Setelah Uni Soviet runtuh, Russia melemah dan berupaya mencari kekuatan, salah satunya dengan bekerja sama dengan Iran membangun reaktor nuklir di Bushr. Tidak hanya dalam hal energi, keduanya pun kemudian menjalin hubungan dalam bidang lain, seperti bidang ekonomi dan pertahanan (Wright, 2018).

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan Iran untuk menandatangani dan menyetujui proposal kesepakatan nuklir, JCPOA. Faktor internal berasal dari adanya perubahan pada politik domestik Iran dimana pada tahun 2013, Iran melakukan pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden tersebut terpilihlah Hassan Rouhani untuk menggantikan Ahmaddinejad sebagai presiden. Rouhani sendiri memiliki orientasi politik yang berbeda dengan Ahmaddinejad dimana Rouhani memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap negara-negara Barat. Hal ini kemudian menjadi alasan Iran dalam menentukan kebijakan untuk menyetujui kesepakatan JCPOA. Sedangkan faktor eksternal berasal dari adanya tekanan-tekanan dari negara lain, khususnya negara P5+1 melalui pemberian sanksi-sanksi ekonomi. Sanksi-sanksi ekonomi tersebut kemudian menyebabkan perekonomian Iran berada dalam kondisi krisis. Selain itu, faktor eksternal juga berasal dari situasi dilema keamanan yang disebabkan karena perilaku dari Arab Saudi di kawasan. Adanya situasi dilema keamanan membuat Iran berupaya mencari cara untuk mengatasi situasi dilema keamanan tersebut.

Di samping faktor internal dan eksternal, keputusan Iran untuk menyepakati kesepakatan JCPOA setelah sebelumnya ditolak disebabkan karena adanya keuntungan atau insentif yang didapat oleh Iran apabila sepakat dengan JCPOA. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu dicabutnya sanksi-sanksi ekonomi yang selama ini diberikan kepada Iran. Dengan dicabutnya sanksi-sanksi tersebut, Iran dapat kembali melakukan kegiatan ekspor impor dengan negara lain. Hal tersebut kemudian juga berdampak pada peningkatan perekonomian nasional Iran dan membuat Iran terhindar dari krisis ekonomi. Keuntungan lain yaitu dengan menyepakati JCPOA, Iran dapat melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat. Sebelum disepakatinya JCPOA, hubungan Iran dengan negara-negara Barat selalu dipenuhi dengan ketegangan. Namun setelah JCPOA disepakati, ketegangan diantara Iran dengan negara-negara Barat pun terminimalisir. Normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat juga secara tidak langsung mereduksi musuh yang harus dihadapi oleh Iran sehingga dapat berfokus dengan kompetisinya dengan Arab Saudi dalam kawasan Timur Tengah.

Referensi

- Al Jazeera (2012) *Timeline : Sanctions on Iran* [online] tersedia dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/20121016132757857588.html> (diakses pada 13 April 2017)
- Al Jazeera (2018) *Syria's Civil War Explained From the Beginning* [online] tersedia dalam <https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html> (diakses pada 22 April 2018)
- BBC News (2014) *US-Iran Relations: A Brief Guide* [online] tersedia dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24316661> (diakses pada 2 Mei 2018)
- BBC News (2015) *Timeline: Iran and UK Relations* [online] tersedia dalam <http://www.bbc.com/news/uk-15949285> (diakses pada 2 Mei 2018)
- BBC News (2018) *Why is There a War in Syria ?* [online] tersedia dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229> (diakses pada 22 April 2018)
- Bronson, Rachel (2011) *Saudi Arab Saudi's Intervention in Bahrain: A Necessary Evil or a Strategic Blunder ?*. Foreign Policy Research Institute [online] tersedia dalam https://www.fpri.org/article/2011/03/saudi-Arab_Saudi-intervention-in-bahrain-a-necessary-evil-or-a-strategic-blunder/ (diakses pada 22 April 2018)
- Davenport, Kalsey (2018) *Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran* [online] tersedia dalam <https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran> (diakses pada 25 Februari 2018)
- El Kasm, Saeb (2008) *A Framework for Diplomatic Engagement : The Iran Nuclear Weapons Program*. Vienna : The University of Vienna School of Law
- Fathollah-Nejad, Ali (2017) "Germany's Relations with Iran beyond the Nuclear Deal: Readjusting Foreign and Development Policy" dalam *Foreign Policy and Next German Government* [online] tersedia dalam https://dgap.org/sites/default/files/article_downloads/12_fathollah-nejad_iran.pdf (diakses pada 2 Mei 2018)
- Financial Tribune (2018) *German Exports to Iran Growing* [online] tersedia dalam <https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/79434/german-exports-to-iran-growing> (diakses pada 2 Mei 2018)
- France 24 (2016) *In Pictures: France and Iran's Turbulent Diplomatic History* [online] tersedia dalam <http://graphics.france24.com/france-iran-relations-pictures/> (diakses pada 2 Mei 2018)
- GlobalSecurity.org (2011) *Iran's Arms Imports* [online] tersedia dalam <https://www.globalsecurity.org/military/world/iran/arms-imports.htm> (diakses pada 30 April 2018)

- Gustavsson, J (1999) "How Should We Study Foreign Policy Change?" dalam *Cooperation and Conflict*, Vol.34, No.1, pp. 73-95.
- Hartert-Mojdehi, Sabine dan Marjory Linardy (2012) *Sunni dan Syiah, Bersaing Sejak Dulu*, disunting oleh Hendra Pasuhuk [online] tersedia dalam <http://www.dw.com/id/sunni-dan-syiah-bersaing-sejak-dulu/a-16189563> (diakses pada 20 Maret 2018)
- Hermann, Charles F (1990) "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy" dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 34, No. 1. The International Studies Association, pp. 3-21.
- Institute for Science and International Security (t.t.) *Iran's Nuclear Fuel* [online] tersedia dalam www.isisnucleariran.org. (diakses pada 7 Januari 2017)
- Jones, Rodney W. et al (1998) *Tracking Nuclear Proliferation: A Guide in Maps and Charts*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Katzman, Kenneth dan Paul K. Kerr (2016) *Iran Nuclear Agreement*. Congressional Research Service.
- Kuek Ser, Kuang Keng (2016) *Where did Iran Get Its Military Arms over the Last 70 Years ?* [online] tersedia dalam <https://www.pri.org/stories/2016-06-01/where-did-iran-get-its-military-arms-over-last-70-years> (diakses pada 30 April 2018)
- Kurniawan, Rahmad (t.t.) *Sejarah Awal Mula Perkembangan Nuklir di Iran* [online] tersedia dalam <http://www.intipsejarah.com/2014/09/sejarah-awal-mula-perkembangan-nuklir.html> (diakses pada 7 Januari 2017)
- Laub, Zachary (2017) *The Impact of the Iran Nuclear Agreement* [online] tersedia dalam <https://www.cfr.org/background/impact-iran-nuclear-agreement> (diakses pada 25 Februari 2018)
- Levallois, A (2016) *Relationship Between the EU Member States and Saudi Arabia in the Field of Security and Defence*. Policy Department, Directorate-General for External Policies.
- Liu, Jun dan Lei Wu (2010) "Key Issues in China-Iran Relations" dalam *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol. 4, No.1. Yunnan University, pp. 40-57
- McCarthy, Niall (2017) *The Top 15 Countries for Military Expenditure in 2016 (Infographic)* [online] tersedia dalam <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/04/24/the-top-15-countries-for-military-expenditure-in-2016-infographic/#210aff6e43f3> (diakses pada 21 April 2018)
- Najjar, Farah dan Khalid Al-Karimi (2017) *Saudi Arabia's War in Yemen: A Strategic Failure* [online] tersedia dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/saudi-arab-saudi-war-yemen-strategic-failure-170823072854582.html> (diakses pada 23 April 2018)

- Nuclear Threat Initiative (2016) *International Atomic Energy Agency (IAEA)* [online] tersedia dalam <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/international-atomic-energy-agency/> (diakses pada 7 Januari 2017)
- Nuruzzaman, Mohammed (2013) "Politics, Economics, and Saudi Military Intervention in Bahrain" dalam *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 43, No. 2 [online] tersedia dalam https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Nuruzzaman/publication/263487967_Politics_Economics_and_Saudi_Military_Intervention_in_Bahrain/links/54f484ff0cf2eed5d734c467/Politics-Economics-and-Saudi-Military-Intervention-in-Bahrain.pdf (diakses pada 23 April 2018)
- Pagi, S. E. (t.t.) *Melihat Peta Sunni-Syiah di Timur Tengah* [online] tersedia dalam <https://www.jejaktapak.com/2016/04/14/melihat-peta-sunni-syiah-di-timur-tengah/> (diakses pada 20 Maret 2018)
- Rydell, Moa (2017) *Syria: Iran's and Saudi Arab Saudiia's New Playground ?*. Department of Political Science, Lund University [online] tersedia dalam <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOID=8909212&fileOID=8910952> (diakses pada 22 April 2018)
- Saraswati, Patricia D.A (2017) *Pengamat: Alasan Saudi Intervensi Yaman Tak Bisa Diterima* [online] tersedia dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171231085943-106-265749/pengamat-alasan-saudi-intervensi-yaman-tak-bisa-diterima> (diakses pada 22 April 2018)
- Snyder, Glenn H. 1984. "The Security Dilemma in Alliance Politics" dalam *World Politics*, Vol. 36, No. 34. Cambridge University Press.
- Wright, Robin (2018) *Russia and Iran Deepen Ties to Challenge Trump and the United States* [online] tersedia dalam <https://www.newyorker.com/news/news-desk/russia-and-iran-deepen-ties-to-challenge-trump-and-the-united-states> (diakses pada 2 Mei 2018)